

STRATEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOTA DUMAI DALAM MEMBANGUN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Caska

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) potensi Kota Dumai menjadi KEK; dan 2) Strategi kebijakan pendidikan. Metode yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik analisis gap (perbedaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, potensi yang dimiliki Kota Dumai dalam menuju Kawasan Ekonomi Khusus yaitu: memiliki letak yang sangat strategis, tersedianya infrastruktur yang cukup memadai; tersedianya tenaga kerja lokal yang cukup tinggi dan sebagian besar masyarakat bersikap positif terhadap KEK. Kedua, Strategi kebijakan pendidikan untuk lima tahun ke depan dalam rangka mempersiapkan kawasan ekonomi khusus: (1) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan (3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

PENDAHULUAN

Kota Dumai mempunyai posisi strategis bila dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini disebabkan oleh karena Kota Dumai terletak pada kawasan Selat Malaka dan memiliki peranan penting sebagai penghubung antar daerah baik secara nasional maupun internasional. Di samping itu, Kota Dumai telah mempersiapkan dengan telah tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur jaringan transportasi darat lokal maupun regional, pelabuhan bertaraf internasional serta bandara.

Dengan ditetapkannya Kota Dumai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan akan semakin memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Melalui KEK akan mendorong kegiatan penanaman modal asing, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Pedoman yang dikeluarkan Tim Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (Departemen Perindustrian, 2006): lokasi yang akan dipilih menjadi KEK minimal harus memenuhi kriteria ekonomi sebagai berikut: (1) terletak dijalur perdagangan internasional dan atau alur laut utama di Indonesia; (2) Terdapat pasar potensial berskala internasional; (3) Bagian dari wilayah yang memiliki sumberdaya alam dan atau sektor unggulan yang berdaya saing internasional; dan (4) Ketersediaan tenaga kerja lokal, baik jumlah maupun kualitas.

Dalam rangka mempersiapkan ketersediaan tenaga kerja lokal seperti yang disyaratkan oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah harus mempunyai Master Plan Pendidikan yang mendukung keberhasilan program KEK. Salah satu perencanaan pendidikan yang perlu dilikakukan adalah membuat strategi dan arah kebijakan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan sebagai kawasan ekonomi khusus.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka makalah ini ingin mengeksplorasi potensi daerah dan persepsi masyarakat terhadap KEK. Setelah diketahui potensi daerah maka disusun sebuah strategi dan arah kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan harapan kebutuhan dari sebuah daerah yang dijadikan kawasan ekonomi khusus.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey di seluruh kecamatan (5 kecamatan) Kota Dumai.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan

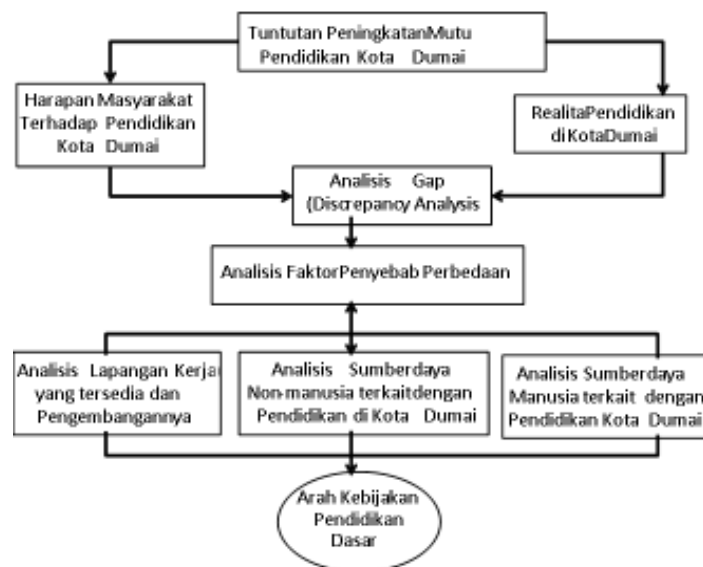
dengan kuesioner dan wawancara mendalam. Selain data primer juga digunakan data sekunder yang dikumpulkan dari Kantor Camat dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan. Data sekunder ini dikonfirmasi dengan informasi dan data primer yang didapatkan di tingkat lapangan.

Responden dalam penelitian ini adalah 1) Camat sebanyak 5 orang, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan sebanyak 5 orang, Kepala Sekolah sebanyak 29 orang, Guru sebanyak 29 orang, Siswa sebanyak 87 orang, dan Orang Tua Siswa sebanyak 58 orang.

Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis gap (*discrepancy analysis*) antara harapan masyarakat atas pendidikan Kota Dumai selaras dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan dibanding dengan realita pendidikan Kota Dumai saat ini.

Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatan penelitian ini, diilustrasikan pada Gambar 1



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Kota Dumai Dalam Menuju Kawasan Ekonomi Khusus

Potensi Bidang Infrastruktur

Kota Dumai memiliki letak yang sangat strategis dan memiliki peranan penting sebagai penghubung antar daerah baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dengan telah tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur jaringan transportasi darat lokal maupun regional, pelabuhan bertaraf internasional serta bandara.

Infrastruktur yang dimaksud di antaranya: (1) Jaringan transportasi darat lokal maupun regional dan keberadaan fasilitas terminal Angkutan Kendaraan Antar Propinsi (AKAP) dan terminal barang yang sudah cukup memadai, walaupun kinerjanya masih membutuhkan peningkatan. Ukuran lebar dan kualitas fisik perlu peningkatan karena masih terdapatnya jalan yang rusak (10%) dan jalan lokal yang belum diaspal (60%). Sistem transportasi lokal masih perlu ditingkatkan. Fungsi terminal AKAP dan barang juga masih belum maksimal karena tidak didukung oleh sub-sub terminal ataupun pangkalan sementara sehingga banyak angkutan umum yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat pemberhentian; (2) Pelabuhan kota Dumai yang bertaraf internasional telah mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan yang mencakup kegiatan ekspor CPO, minyak bumi, ekspor hasil bumi dan industri. Dengan dibangunnya sentra agribisnis dan pelabuhan Roro untuk tujuan pulau Rupa dan Melaka, maka kapasitas pelabuhan kota Dumai akan lebih memadai lagi. Namun demikian,

pergudangan dan kualitas jalan dan pengaturan sistem transportasi di kawasan pelabuhan masih perlu peningkatan; dan (3) Bandar udara Pinang Kampai merupakan bandar udara yang belum optimal dipergunakan karena frekuensi penerbangan yang masih rendah dan kapasitasnya masih sangat terbatas untuk pesawat jenis Fokker -100.

Infrastruktur utilitas perkotaan yang mencakup kelistrikan dan sarana telekomunikasi kota Dumai saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini tercermin dari: (1) Energi listrik dari PLN yang disuplai dari PLTA Kota Panjang dan PLTG Teluk Lembu saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengguna seperti publik/sosial, rumah tangga, komersial dan industri, sementara permintaan terus meningkat setiap tahunnya. Penambahan daya telah direncanakan dengan pembangunan PLTU dan PLTG; (2) Kota Dumai telah dilayanani telekomunikasi modern termasuk telepon selular dan sambungan internet. Tambahan layanan telekomunikasi diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan Kota Dumai yang cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan secara umum masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan pelayanan. Di antaranya: (1) Tingkat pelayanan air bersih di Kota Dumai belum memadai, mengingat tingkat pelayanan (sistem perpipaan) yang dikelola oleh PDAM saat ini baru mencapai 40% dari seluruh kebutuhan kota. Peningkatan pelayanan air bersih telah direncanakan melalui master plan air bersih yang memanfaatkan sumber air dari Sungai Mesjid dan Sungai Rokan; (2) Sistem jaringan *drainase* kota Dumai cukup baik didukung dengan adanya beberapa saluran primer seperti saluran Parit Paman dan saluran Bintang-Kamboja di bagian barat saluran sekunder disepanjang sisi kiri kanan jalan kota, maupun saluran tersier di beberapa daerah pemukiman. Di beberapa lokasi telah dilakukan perbaikan dan peningkatan ukuran saluran untuk mengatasi genangan air yang sesekali masih terjadi; dan (3) Fasilitas kebersihan seperti sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Tempat pembuangan Sampah Akhir (TPA) serta alat-alat angkut sampah sudah cukup lengkap tersedia di kota Dumai.

Potensi Sumber Daya Manusia

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai sebesar 4,3% dengan jumlah penduduk yang termasuk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 yaitu 153.268 jiwa dan bukan usia kerja berjumlah 77.853 jiwa, dengan indikator *dependency ratio* (DR) 0,51. Kelompok umur penduduk yang paling dominan adalah umur 20 – 24 tahun (24.293 jiwa atau 11,25 %), sedangkan komposisi yang paling rendah adalah pada kelompok umur 60 tahun ke atas (7.013 jiwa atau 3,24 %). Persediaan tenaga kerja atau penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) cukup tinggi yaitu 52,94%, komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar (33%) berpendidikan SLTA (SMU+SMK berjumlah 48.220 jiwa) diikuti berpendidikan SD (37.447 atau 25 %) dan SLTP (35.304 jiwa atau 24 %).

Pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi yaitu 6,14% per tahun, di mana pada tahun 2007 jumlah angkatan kerja Kota Dumai diperkirakan mencapai 99.643 jiwa. Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2007 berjumlah 9.439 jiwa, dengan kelompok umur dominan yaitu 20-39 tahun. Jumlah pencari kerja yang tertinggi adalah SMK yaitu 3.146 jiwa (33%), diikuti Diploma ke atas yaitu 2.890 jiwa (30%), dan SMU 2.471 jiwa (26%).

Jumlah Kesempatan kerja di Kota Dumai pada tahun 2007 adalah 71.568 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,101%. Pada tahun 2007 diperkirakan jumlah kesempatan kerja akan bertambah menjadi 75.153 jiwa, tahun 2006 sebanyak 78.918 jiwa, tahun 2007 sebanyak 82.871, dan tahun 2010 sebanyak 95.959 jiwa. Kesempatan kerja menurut golongan umur di Kota Dumai pada tahun 2004 didominasi oleh kelompok umur 25-29 tahun (12.166 jiwa atau 17%) dengan tingkat pertumbuhan 2,951% per tahun, dan didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA umum (19.156 jiwa atau 26,8%) dengan tingkat pertumbuhan 5,013% per tahun. Penduduk usia kerja (tenaga kerja) Kota Dumai sebagian besar berpendidikan SLTA (umum dan kejuruan). Partisipasi angkatan kerja yang SLTA Kejuruan (76,2%) lebih tinggi bila dibandingkan dengan SLTA Umum 65,6%).

Dukungan Masyarakat Terhadap KEK Kota Dumai

Masyarakat Kota Dumai memberikan dukungan yang baik terhadap rencana KEK, yang terlihat dari

indikator persepsi tentang KEK Dumai, sikap terhadap KEK Dumai, dan aspirasi yang baik, hanya indikator pemahaman tentang KEK yang masih rendah. Sebanyak 86 % masyarakat mendukung rencana KEK Dumai.

Pemahaman masyarakat Kota Dumai sebagian besar (59,33%) termasuk dalam kategori rendah. Rendahnya pemahaman tentang KEK disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang KEK yang mereka peroleh dari media massa dan media cetak.

Sebagian besar masyarakat (60%) memberikan persepsi yang baik pada tujuan KEK Dumai, sebagian besar 56,7% masyarakat memberikan persepsi yang baik terhadap manfaat KEK Dumai, dan 53,3% berpersepsi baik terhadap dampak KEK, karena dapat memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal asing dalam pandangan responden dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan volume produksi, dan perdagangan.

Sebagian besar masyarakat (74%) bersikap positif terhadap KEK Dumai yang merupakan cerminan atas dukungan yang baik sehingga dapat memunculkan pola perilaku yang baik dari masyarakat dalam upaya mewujudkan Dumai Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

B. Arah dan Strategi Kebijakan Pendidikan Kota Dumai

Arah dan strategi kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Dumai untuk lima tahun ke depan dalam rangka mempersiapkan kawasan ekonomi khusus diarahkan pada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan. Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan terutama pada: (1) Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan bagi anak usia dini, perintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, dan pendidikan menengah pada setiap jenis kelembagaan satuan program pendidikan, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.

Pemerataan pelayanan kelembagaan pendidikan dalam rangka merintis wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, maka yang perlu dilakukan adalah pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Pemerataan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, MI-MTs satu dan SMP-MTs Terbuka menjadi lembaga pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entrepreneur, serta penerapan teknologi dasar; (2) Pemerataan pelayanan pendidikan MDA/MDW, Paket A/B/C, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu; (3) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan; (4) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; (5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; (6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan *reward* bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; (7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan dalam proses pembelajaran dan pelatihan pada setiap kelembagaan satuan program pendidikan, sehingga memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan dalam pendidikan dasar dan menengah, diprioritaskan pada penguatan relevansi kurikulum

pada setiap satuan program pendidikan dasar dan menengah, melalui program: (1) Penguatan relevansi muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; (2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan; (3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar dan menengah; (4) Penguatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan; (5) Penguatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan; (6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tutor/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan; (7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan; (8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar dan menengah.

Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Aspek ini masih berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yang memadai. Dalam hal ini harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifat pengembangan dan peningkatan mutu tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pembangunan pendidikan.

a. Perencanaan dan Program

Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada penguatan pelayanan sistem perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih aspiratif dan partisipatif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Pendidikan; (2) Penguatan rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan pada setiap satuan pendidikan; (3) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana pendidikan; (4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan.

b. Organisasi Pelaksanaan Program

Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan kinerja dan produktivitas pelayanan organisasi pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan; dan (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan.

c. Pengawasan dan Pengendalian Program

Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan; (2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan; dan (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan.

d. Evaluasi Program

Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem penilaian pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pembangunan pendidikan; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program

Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan pelayanan sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program

yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan; (2) Penguatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan; (2) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung jawaban.

f. Penganggaran Biaya Program

Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan anggaran biaya pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan.

g. Partisipasi Masyarakat

Kebijakan dalam partisipasi masyarakat dalam pendidikan, diprioritaskan pada peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan stakeholders pendidikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan *stakeholders*; (2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.

h. Sistem Informasi Manajemen

Kebijakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasis TIK; (2) Penguatan intensitas pemeliharaan sarana TIK Pendidikan; (3) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; (4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data.

i. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas manajemen SDM kependidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Manajemen SDM pendidikan; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengelola kepegawaian.

j. Administrasi Sarana Perlengkapan

Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: (1) Penguatan Peraturan Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; (2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana pendidikan; (3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.

KESIMPULAN

1. Potensi yang dimiliki Kota Dumai dalam menuju Kawasan Ekonomi Khusus adalah: 1) Kota Dumai memiliki letak yang sangat strategis dan didukung oleh penyediaan infrastruktur yang cukup memadai di antaranya: jaringan transportasi darat lokal maupun regional dan keberadaan fasilitas terminal Akap dan terminal barang, pelabuhan kota Dumai yang bertaraf internasional, Bandar udara Pinang Kampai, penambahan daya telah direncanakan dengan pembangunan PLTU dan PLTG, telah ada *master plan* air bersih yang memanfaatkan sumber air dari Sungai Masjid dan Sungai Rokan, dan sistem jaringan *drainase* yang cukup baik; 2) Persediaan tenaga kerja atau penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang cukup tinggi yaitu 52,94%, komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar (33%) berpendidikan SLTA (SMU+SMK berjumlah 48.220 jiwa) diikuti berpendidikan SD (37.447 atau 25%) dan SLTP (35.304 jiwa atau 24%); dan 3) Sebagian besar masyarakat (74 %) bersikap positif terhadap KEK Dumai yang merupakan cerminan atas dukungan yang baik sehingga dapat memunculkan pola perilaku yang baik dari masyarakat dalam upaya mewujudkan Dumai Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Arah dan strategi kebijakan pendidikan dasar Arah kebijakan pembangunan pendidikan dasar di Kota Dumai untuk lima tahun ke depan dalam rangka mempersiapkan kawasan ekonomi khusus diarahkan pada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan. Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan terutama pada: (1) Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; dan (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

RUJUKAN

- Badan Perencanaan Daerah Kota Dumai, 2006, *Master Plan Infrastruktur Kota Dumai*.
- Badan Perencanaan Daerah Kota Dumai, 2007, *Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (Kajian Dumai Menghadapi Kawasan Ekonomi Khusus)*.
- Bapeda Kota Dumai, 2009, *Masterplan Pendidikan Kota Dumai*.
- Caska, 2008, *Potensi dan Kebijakan Kota Dumai Dalam Membangun Kawasan Ekonomi Khusus*, Jurnal Ekonomi FE Universitas Taruma Negara, Jakarta.
- Caska dan Henny Indrawati, 2009, *Strategi dan Model Pengembangan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*, Sosiohumaniora Universitas Padjadjaran Bandung.
- Caska, 2010, *Arah Kebijakan Pendidikan Dasar Kota Dumai Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus*, Jurnal Pendidikan Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan*, Jakarta: Sesjen Depdiknas.
- Menteri Perdagangan, 2006, *Tinjau Batam Untuk Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, http://www.depdag.go.id/ind/publikasi/Siaran_Pers/2006/Batam17Juni06.htm.